

TESIS

**PENGATURAN HUKUM TENTANG DIGITALISASI
KENOTARIATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**



Diajukan Oleh

AMELIA KARTIKA DEWI

NIM. 2420216320056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juli 2026

**Pengaturan Hukum Tentang Digitalisasi Kenotariatan Dalam
Perspektif Hukum Progresif**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**AMELIA KARTIKA DEWI
NIM. 2420216320056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juli 2026**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk dinilai
Pada Tanggal 28 Juli 2026

PEMBIMBING



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2 002

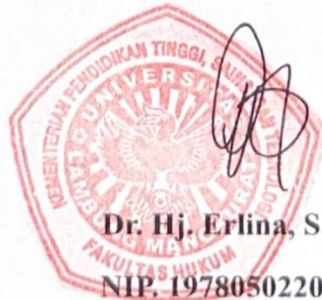
Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada tanggal Tanggal 14 Juli 2026

Susunan panitia penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL. M.PhD

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Kartika Dewi, S.H.

NIM : 2420216320056

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat

Judul Tesis : Pengaturan Hukum Tentang Digitalisasi Kenotariatan Dalam Perspektif
Hukum Progresif

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Amelia Kartika Dewi, S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

AMELIA KARTIKA DEWI

NIM. 2420216320056

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PENGATURAN HUKUM TENTANG DIGITALISASI KENOTARIATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 20%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 30 Juli 2026



Mengetahui,
Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Bidang Akademik

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Hl. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

Pengaturan Hukum Tentang Digitalisasi Kenotariatan Dalam Perspektif Hukum Progresif

Oleh :

Amelia Kartika Dewi¹, Rahmida Erliyani²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman

Penelitian ini membahas pengaturan hukum digitalisasi kenotariatan di Indonesia dalam perspektif hukum progresif. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan hukum, termasuk praktik kenotariatan, sehingga memunculkan konsep digitalisasi kenotariatan atau *cyber notary* sebagai bentuk adaptasi profesi notaris terhadap era digital. Digitalisasi kenotariatan menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi, kemudahan akses layanan hukum, penggunaan tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen digital, dan komunikasi berbasis teknologi. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan berupa keamanan data pribadi, keabsahan dokumen elektronik, serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Dasar normatif digitalisasi notaris dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*). Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan meskipun pengaturannya masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk melayani manusia, bersifat dinamis, serta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem yang kaku dan final.

Dalam konteks digitalisasi kenotariatan, hukum progresif mendorong pembaruan regulasi agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Konsep ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan hukum.

Penelitian juga mengkaji konsep digitalisasi kenotariatan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris, termasuk verifikasi identitas, pembuatan akta, penggunaan tanda tangan elektronik, serta penyimpanan dokumen digital.

¹ NIM 2420216320056

² PEMBIMBING

Konsep ini telah berkembang di berbagai negara dan mulai diimplementasikan di Indonesia secara terbatas.

Meskipun demikian, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sedangkan UUN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan di hadapan notaris.

Permasalahan lain adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta secara elektronik serta standar keamanan digital dalam praktik kenotariatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi digitalisasi kenotariatan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan digitalisasi kenotariatan.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi kenotariatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era modern. Namun, keberhasilannya memerlukan harmonisasi regulasi, pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris, penguatan perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip hukum progresif agar pelayanan kenotariatan tetap menjamin keautentikan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pengaturan Hukum Tentang Digitalisasi Kenotariatan Dalam Perspektif Hukum Progresif

Oleh :

Amelia Kartika Dewi³, Rahmida Erliyani⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Digitalisasi Kenotariatan, Pembaharuan Hukum, Kepastian Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan hukum dan kenotariatan. Digitalisasi kenotariatan atau Cyber Notary muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Meskipun konsep digitalisasi kenotariatan telah memperoleh pengakuan melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait kehadiran fisik para pihak, penggunaan dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif guna mendukung implementasi digitalisasi kenotariatan serta mewujudkan pelayanan kenotariatan yang modern, adaptif, dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, sejalan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat modern

³ NIM 2420216320056

⁴ PEMBIMBING

LEGAL REGULATION ON NOTARIAL DIGITALIZATION FROM THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW

By :

Amelia Kartika Dewi¹, Rahmida Erliyani²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 110 Pages

ABSTRACT

Keywords : Notarial Digitalization, Law Reform, Legal Certainty

Development of information technology has pushed transformation in various aspect of life including legal service sector and notarial sector. Notarial digitalization or cyber notary appeared as a form of adaptation to society's need who want more effective and efficient legal services, and on the basis of technology. Although the concept of notarial digitalization has got recognition through the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position, its implementation is still facing varied normative obstacles because there is not yet comprehensive regulation. This study is normative legal research, using statute, conceptual, and historical approaches. The legal resources consist of primary, secondary, and tertiary ones obtained through library study, then analyzed qualitatively with prescriptive method.

The findings of the study indicate that notarial digitalization has got legal ground through various legislation, but its regulations are still partial and have not yet provided sufficient legal certainty. Besides, there is disharmonization between Notary Position Act and Electronic Information and Transactions Act, particularly related to physical attendance of the parties, utilization of electronic documents, and electronic signatures in the drafting of authentic deeds. Therefore, it is deemed necessary for harmonization and more comprehensive law reform in order to support the implementation of notarial digitalization and to actualize modern and adaptive notarial services, and keep guaranteeing legal certainty for Indonesia society in this digital transformation era which is developing very fast, in line with the legal need and development of modern society.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320056

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Kn
Authorized Sworn Translator

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

Papa & Mama Tersayang

Papa dan Mama tersayang, sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya persembahkan kepada Papa dan Mama saya Sudarman dan Liesdya Widiastuti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta pengorbanan tanpa henti demi setiap langkah dan keberhasilan saya. Terima kasih atas cinta tulus yang menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak-kakakku Tersayang

Saya ucapkan terima kasih kepada kakakku tersayang Akbar Budi Prasetyo dan Putri Ayu Kusumaningrum karena atas dorongan dan motivasi dari kalian saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah dengan sabar memberikan arahan, ilmu, nasihat, serta bimbingan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaan dalam membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ibu selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Ibu dapat terwujud atas kehendak Allah SWT.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah dan berkat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul : Pengaturan Hukum Tentang Digitalisasi Kenotariatan Dalam Perspektif Hukum Progresif , sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sebagai ketua penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
3. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Ketua penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
4. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL. M.PhD selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Orang tua tercinta dan tersayang, Sudarman dan Liesdya Widiastuti, serta kepada saudara-saudari tersayang Akbar Budi Prasetyo, Putri Ayu Kusumaningrum serta keponakan tersayang Arkanza Khalif Nadhirrizky yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu terutama Regu Anggrek, dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat waktu;
9. Dan terakhir kepada M. Rafi'i, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari hidup penulis, selalu menemani dikala duka maupun suka, menjadi warna yang tidak pernah pudar, selalu memberikan semangat atas segala kerumitan perjalanan ini hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan-Nya agar selalu bisa bersama merangkai cerita yang baru.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia akademik, serta bagi para pembaca pada umumnya. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Banjarmasin, 26 Juni 2026



AMELIA KARTIKA DEWI, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Tinjauan Pustaka	16
A. Kerangka Konseptual.....	16
1. Era Digitalisasi	16
2. Digitalisasi Kenotariatan.....	19
3. Notaris	22
B. Kerangka Teoritik	25
1. Teori Hukum Progresif.....	25
2. Teori Kewenangan	28
3. Teori Kepastian Hukum	31
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Tipe Penelitian.....	34

3. Sifat Penelitian	34
4. Pendekatan Penelitian	35
5. Jenis Bahan Hukum	35
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
7. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	36
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II KONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM DIGITALISASI KEWENANGAN	
NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	38
A. Pengaturan Hukum Kewenangan Digitalisasi Notaris Di Indonesia	38
B. Disharmonisasi Pengaturan Digitalisasi Notaris Menurut Undang Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	50
BAB III PENGATURAN DIGITALISASI KENOTARIATAN DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM PROGRESIF	65
A. Pengaturan Digitalisasi Kenotariatan Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia	65
B. Digitalisasi Kenotariatan Sebagai Pembaharuan Hukum	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	91